

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdoel Raoef Soehoed. 2004. *Reklamasi Laut Dangkal Canal Estate Pantai Mutiara Pluit: Perekayasaan dan Pelaksanaan Reklamasi Bagi Proyek Pantai Mutiara di Pluit*. Jakarta: Djambatan.
- Abdul Aziz Nasihuddin, *et.al.*, 2024. *Teori Hukum Pancasila*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana. Cetakan I.
- Abdul Razak, 2021. *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Litera. Cetakan I
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Al. Andang Binawan dan Tanius Sebastian. 2012. *Menim(b)ang keadilan eko-sosial*. Jakarta: Epistema Institue.
- Al. Andang Binawan dan Tanius Sebastian. 2012. *Menim(b)ang Keadilan Eko-Sosial*. Jakarta: Epistema Institute.
- Ali purwito. Indriani. 2015. *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak dalam Kepabeanan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Asikin zainal. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Bernard Arie Sidharta. 2009. *Meuwissen tentang pengembang Hukum, Ilmu*

- Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, Bandung: PT Rafika Aditama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fahmi Wibawa. 2007. *Panduan Praktis Perizinan Usaha terpadu*. Jakarta: Grasindo.
- Hanif Nurcholis, 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, hlm, 312.
- Hans Kelsen. 2011. *General Theory of Law and State*. (terjemahan Rasisul Muttaqien). Bandung: Nusa Media.
- Hyronimus Rhiti. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, cetakan kelima.
- I made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian HUKUM NORMATIF dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ifat Fauziah. 2018. *Buku Panduan Ekspor & Impor*, Jakarta: Ilmu Cemerlang Group..
- Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Harapan.
- Irwansyah. 2022. *PENELITIAN HUKUM Penelitian Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Jakarta: Ind Hill.CO.

Jimly Assiddiqie. 1997. *Teori & aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*.

Johnny Ibrahim. 2007. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*.

Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenada Media Group.

Kahar Masyhur. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*, Jakarta: Kalam Mulia.

Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Kismartini dan Burhan Bungin. 2019. *Wilayah Pesisir Indonesia : Narasi Kebijakan Publik Masalah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki. 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*. Jakarta: Tatanusa

Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua. Jakarta: Kencana.

N. Gregory Mankiw. 2006. *Principle Of Economic Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta : Salemba Empat.

Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: KENCANA.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Binna Ilmu.

Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia..

Ravyansah, *et.al.*, 2022. *Kebijakan Publik*. Padang: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.

Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ridwan HR. 2006 *Hukum Adminstrasi Negara*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.

Ridwan HR. 2006. *Hukum Adminstrasi Negara*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.

Rina Yulianti. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Hak Masyarakat Atas Sumber Daya Pesisir*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

S. Pamudji. 1983. *Ekologi Administrasi Negara*, Jakarta: PT. BINA AKSARA.

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti. Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Ctk. Kedelapan. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sirajun, et.al, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Malang: Setara press, hlm, 126.

Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindakan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soeroso. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt. Sinar Grafika. Sukarno Aburaera. et.al., 2017. *Filsafat Hukum: Teori Dan Praktik*, Jakarta: Kencana.

Sopi. 2013. *Pengaruh Pengawasan dan Penilaian Prestasi Kerja terhadap Motivasi Pegawai kantor Bea dan Cukai*. Bandung: Tipe Madya Bandung.

Suhrawardi K. Lunis. 2000. *Etika Profesi Hukum*. Ctk. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Sujanto. 1983. *Beberapa pengertian di bidang pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Victor M. Situmorang, Jusuf Juhir. 1994. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Jakarta: penerbit Rineka Cipta.

Victorianus dan Randa Puang. 2015. *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Yogyakarta: CV. Budi Utama.

W.J.S. Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Difa Mutiara Jayanti. 2024. *Kebijakan Pemanfaatan Hasil Sedimentasi Pasir Laut Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Fikih Lingkungan*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Salsabila Yustisya Amarin. 2024. *Politik Hukum Ekspor Pasir Laut Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Zulham Mubaraq. 2024. *Relevansi Masalah dan Hukum Lingkungan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut*. Tesis Program Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

JURNAL DAN KARYA ILMIAH LAINNYA

Andri G. Wibisana, 2017, *Perlindungan Lingkungan Dalam Perspektif Keadilan Antar Generasi : Sebuah Penelusuran Teoritis Singkat*, *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Jilid. 46, Nomor. 1, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

- Andri G. Wibisana. 2017. *Keadilan Dalam Satu (Intra) Generasi: Sebuah Pengantar Berdasarkan Taksonomi Keadilan Lingkungan*. Mimbar Hukum. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Volume 29. Nomor 26.
- Basse Siang Parawansa. 2008. *Marine Politan sebagai Basis Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan*, Jurnal Ilmu Kelautan dan Perikanan, Volume. 18 Nomor 1, Makasar: Universitas Hasanuddin.
- Defrio Nandi Wardhana, dkk. 2020. *DESK STUDY WALHI: Analisis Kesenjangan Kebijakan Iklim Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Antargenerasi*, Jakarta Selatan: Eksekutif Nasional WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia).
- Dwi Lestari Indah Sari. 2023. *Kebijakan Ekspor Pasir Laut Pasca DiUndangkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Berdasarkan Perspektif Teori Sistem Hukum*. Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Volume 18. Nomor 2.
- Elly Kristiani Purwendah. 2020. *Keadilan Ekologi dan Keadilan Sosial Sebagai Dasar Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha. Volume 8. Nomor 2.
- Ergina Faralita. *Konsekuensi Hukum Terhadap Tidak Disertajannya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

(Jurnal: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Banjarmasin, Agustus 2022).

Halena Dwi Yansen, Lulu Yuliana Putri, dan Wangi Ramadhan. 2023. *Analisis Kebijakan Ekspor Sedimentasi Laut (Pasir Laut) Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Laut*, Lex Sharia Pacta Sunt Servada: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan. Volume 1. Nomor 1.

Ibra Fulenzi Amri. Siti Aura Fadhillah, dkk. 2023. *Sinkronisasi Vertikal PP Nomor 26 Tahun 2023 dengan UUD NRI Tahun 1945 Legal Policy Ekspor Pasir Laut*, Jurnal UNES LAW REVIEW. Volume. 6, Nomor. 1.

Irwan Triadi dan Aldy Mirozul. 2023. *Kebijakan Ekspor Pasir Laut Terhadap Ancaman Pertahanan Keamanan Negara*. Al-Qisthas. Volume. 14, Nomor. 2.

Kristiawan Putra Nugraha. 2024. *Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Tinjauan Terhadap dampak Lingkungan*. QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN. Volume 06. Nomor 2.

Kristiawan Putra Nugraha. 2024. *Analisis Dampak Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut: Tinjauan Terhadap Dampak Lingkungan*

Hidup, QUANTUM JURIS: JURNAL HUKUM MODERN. Volume 06.
Nomor. 2.

Meeva Sucianda Bejeng. 2023. *Implikasi Yuridis Terkait Problematika Aturan Ekspor Pasir Laut Di Indonesia*. Jurnal Kertha Desa. Volume. 11 Nomor. 7 Tahun 2023.

Miftakhul Shodikin. 2023. *Perkembangan Subjek Hukum: Penetapan Sungai sebagai Subjek Hukum Dalam Perspektif Keadilan Ekologis*. AMMER: Jurnal of Academic & Multidiciplime Research. Volume 3. Nomor 3.

Pan Mohamad Faiz. 2009. *Teori Keadilan John Rawla*, Jurnal Konstitusi, Volume 6, Nomor 1.

Ramli Hamid. *Dampak Penambangan Pasir Laut Terhadap Kehidupan Ekonomi Masyarakat Nelayan di Provinsi Kepulauan Riau*. Tugas Kuliah, Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ).

Resa Aditya dan Tetty Marlinan Tarigan. 2023. *Pro dan Kontra Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut: Perspektif Fiqih Siyasah Syar'iyah*. Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. Volume 5. Nomor 3.

Rio Admiral Parikesit, 2021. *Penerapan Asas Legalitas (Legaliteit Beginsel/Wetmatigheid Van Bestuur) Dalam Kebijakan Sentralisasu Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan*, JurnaLEGISLASI INDONESIA, Volume 18, Nomor 4.

Siti Shofia Yulianti Wenny Eka Maulitya. 2024. *PENAMBANGAN PASIR LAUT BERDAMPAK PADA EKOSISTEM PESISIR DI WILAYAH KEPULAUAN RIAU (Sea Sand Mining Has An Impact On Coastal Ecosystems In The Riau Islands Region)*, Indonesian Conference of Maritime. Volume. 2. Nomor. 1.

Sofyan Hadi dan Tomy Michael, 2017. *Prinsip Keabsahan (rechmatigheid) dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara*, JURNAL CITA HUKUM, Volume 05, Nomor 2.

Yudistiro. 2011. *Kegagalan dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Kajian Putusan No.198/Pid.B/2004/PN.Grt)*, Jurnal Yudisial, Volume.IV, Nomor 02

SUMBER INTERNET

Abdullah Fahrieza. 2023. *Regulasi Ekspor Pasir Laut: Demi Kesehatan Laut atau Cuan Golongan Oligarki*. Kumparan.com. <https://m-kumparan-com.cdn.ampproject.org/v/s/m.kumparan.com/amp/abdullahfahrieza/regulasi-ekspor-pasir-laut-demi-kesehatan-laut-atau-cuan-golongan-oligarki- diakses pada 23 Mei 2024, pukul 19.57 WITA>.

Achmad Dwi Afriyadi, *RI Buka Keran Ekspor Pasir Laut*, Detik Finance, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-7546010/ri-buka-keran-ekspor-pasir-laut>.

Ady Thea DA, 2023, *Kebijakan Ekspor Pasir Laut Harus Selaras dengan Revisi UU KSDAHE*, Hukum Online.Com, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kebijakan-ekspor-pasir-laut->

harus-selaras-dengan-revisi-uu-ksdahe-lt6481636037191/ diakses pada 26 Oktober 2024, Pukul 19.21 WITA.

Badan Keahlian DPR RI, *Analisis Ringkas Cepat Ekspor Pasir Laut, Pusat Analisis Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, July 2023, diakses pada 11 November 2024,
<https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-44.pdf>

Ban on Cambodian Sand Exports to Singapore, 2017, *nepia.com*
<https://www.nepia.com/industry-news/ban-on-cambodian-sand-exports-tosingapore/>, diakses pada 4 November 2024, pukul 20.15 WITA.

BM Lukita Grahadyarini, *Partisipasi Publik Diabaikan dalam Kebijakan Ekspor Pasir Laut, Sejumlah kalangan menilai kebijakan ekspor pasir laut dinilai minim melibatkan peran publik. Padahal, masyarakat pesisir dan nelayan paling terdampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi pasir laut*, KOMPAS, diakses pada 20 September 2023,
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/05/31/partisipasi-publik-diabaikan>

Bm Lukita Grahadyarini, *Pemerintah Buka Jalan Ekspor Pasir Laut*, Kompas.id,
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/09/09/ekspor-pasir-laut-dimulai>

CSA Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, Artikel Nusa Putra University <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial>, diakses pada 4 November 2024, Pukul 20.00 WITA

Fathin Ungku dan Rozanna Latiff, 2019, *Exclusive: In blow to Singapore's expansion, Malaysia bans sea sand exports*, reuters.com <https://www.reuters.com/article/us-malaysia-singapore-sand-exclusive-idUSKCN1TY0C4/> , diakses pada 4 November 2024, pukul 20.30 WITA.

Harsanto Nursadi, 2008, *Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Universitas Terbuka, hlm 1.3. Sistem Hukum Indonesia by Harsanto Nursadi (z-lib.org).pdf. <https://jdih.situbondokab.go.id/barang/buku/30>.

[https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektifilmu sosial/](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektifilmu%20sosial/) diakses pada 5 November 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Luar Jaringan (Luring), Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional.

Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan Cukai. *Ekspor*, <https://www.beacukai.go.id/arsip/pab/ekspor.html>. diakses pada 22 Mei 2024, pukul 13.00 WITA.

Lestari, 2023 KKP Siapkan Aturan Turunan PP Nomor 26 Tahun 2023 terkait Ekspor Pasir Laut, Kompas. Com.

<https://money.kompas.com/read/2023/06/07/150922626/kkpsiapkan-aturan-turunan-pp-nomor-26-tahun-2023-terkait-ekspor-pasir-laut?page=all>, diakses pada 25 Juni 2024, pukul 21.32 WITA.

Martiyasari Rizky, "Aturan Ekspor Pasir Laut: Disetop Megawati, Dibuka Jokowi", <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230529183019-4-441557/aturan-ekspor-pasirlautdisetop-megawati-dibuka-jokowi> diakses 22 Oktober 2024.

Muhammad Dzar Ashari Muthahhar, 2024, *Mengkritisi Kebijakan Pencabutan Larangan Ekspor Pasir Laut*, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengkritisi-kebijakan-pencabutan-larangan-ekspor-pasir-laut-lt6738d4985744f/>, diakses pada 20 November 2024, pukul 17.21.

Muhammad Idris, 2024, *Malaysia dan Kamboja Kompak Larang Ekspor Pasir Laut ke Singapura*, Kompas.com, <https://money.kompas.com/read/2024/09/18/163709326/malaysia-dan-kamboja-kompak-larang-ekspor-pasir-laut-ke-singapura?page=all>, diakses pada 4 November 2024, pukul 20.15. WITA.

Muhammad Yasin, " *Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara*", Artikel Klinik Hukum Online, Edisi 04 April 2017 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986/>, Diakses pada 22 Juni 2024, pukul 19.27 WITA.

Nandy, Pengertian Hukum Lingkungan Hingga Asas-Asas Serta Undang-Undang, Gramedia blog, https://www.gramedia.com/literasi/hukum-lingkungan/#google_vignette , diakses pada 4 November 2024, pukul 21.00 WITA.

Annisa Nabilatul Kaira, *Polemik Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023: Laut Buntung, Oligarki Untung*, Kumparan.com, diakses 23 Oktober 2024, <https://kumparan.com/annisa-nabilatul-khaira-1661926381089886817/polemik-peraturan-pemerintah-nomor-26-tahun-2023-laut-buntung-oligarki-untung-20oeqxuxXxh>

Ombudsman Republik Indonesia, Kesesatan Regulasi PP 26 Tahun 2023, KKP Kini Jadi Sakti, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/kesesatan-regulasi-pp-26-tahun-2023-kkp-kini-jadi-sakti>

Pattaya Mail, 2023, *Thailand bans exporting of natural sand*, *Pattayamail.com*, <https://www.pattayamail.com/thailandnews/thailand-bans-exporting-of-natural-sand-423431>

PUSAT ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

NEGARA. Analisis Ringkas Cepat Ekspor Pasir Laut, Berkas DPR, 2023, <https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-ringkas-cepat/public-file/analisis-ringkas-cepat-public-44.pdf>

Robert, *Legalitas: "Pengertian, Tujuan, Manfaat, dan Aspeknya, Artikel IDN Times"*, Edisi 03 September 2023.

<https://www.idntimes.com/life/career/robertus-ari/legalitas-adalah>

Diakses pada 22 Juni 2024, pukul 18.53 WITA.

Rully R. Ramli dan Aprilla Ika. 2023. *Keran Ekspor Pasir Laut Kembali Dibuka Setelah 20 Tahun Dihentikan*. Kompas.com.

<https://money.kompas.com/read/2023/05/29/125101826/keranekspor-pasir-laut-kembali-dibuka-setelah-20-tahun-dihentikan> diakses pada 23 Mei 2024, pukul 19.00 WITA.

Tim CNN Indonesia,

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20230531155220-92-956334/menteri-kkp-jawab-isu-jokowi-izinkan-ekspor-pasir-laut-demi-singapura>. Diakses, 14 Oktober 2024.

Tim Redaksi CNBC Indonesia. 2022. *Mengenal Apa Itu Ekspor Impor, Pengertian, Tujuan & Contohnya*. CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/cdn.ampproject.org/v/s/www.cnbcindonesia.com>, diakses pada 23 Mei 2024, pukul 12.15 WITA.

WALHI, 2023, *Seruan 28 Eksekutif Daerah WALHI Se-Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia*, <https://www.walhi.or.id/seruan-28-eksekutif-daerah-walhi-se-indonesia-kepada-presiden-republik-indonesia>, diakses pada 6 November 2024, Pukul 19.00 WITA.

Willa Wahyuni, 2023, *Begini Pengaturan Tentang Pengelolaan Pasir Laut Yang Baru*, Hukum Online.com

<https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-pengaturan>

tentangpengelolaan-pasir-laut-yang-baru-lt64a6a55b9f46e/ diakses
pada 25 Juni 2024, pukul 21.16 WITA.

Yudono Yanuar, Kementerian Kelautan: *Potensi Pasir Laut yang Akan
Disedot 17,6 Miliar Meter Kubik*, Tempo.co, Kementerian Kelautan:
Potensi Pasir Laut yang Akan Disedot 17,6 Miliar Meter Kubik - Bisnis
Tempo.co

Richaldo Hariandja , 9 October 2023, *Soal Rekomendasi Reformasi Hukum
Agraria, Sosiolog: Pemerintah Harus Serius Jalankan*, MONGABAY
SITUS BERITA LINKUNGAN, Jakarta,
[https://www.mongabay.co.id/2023/10/09/soal-rekomendasi-
reformasi-hukum-agraria-sosiolog-pemerintah-harus-serius-
jalankan/](https://www.mongabay.co.id/2023/10/09/soal-rekomendasi-reformasi-hukum-agraria-sosiolog-pemerintah-harus-serius-jalankan/)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang kelautan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021
tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan
Lingkungan Hidup, dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2023 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di
Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil
Sedimentasi di Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Berusaha Perizinan Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif atas

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi Di Laut Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6801

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020,